



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT WILAYAH IV

LAPORAN KINERJA

T A H U N A N G G A R A N

2 0 2 3

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV, penjabaran dari komitmen, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan pencapaian target kinerja dan anggaran sesuai dengan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Wilayah IV merupakan unsur pelaksana pengawasan intern pada Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Pasifik, Amerika dan Karibia, Unit Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Ditjen Protkons), serta Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan (Pustik-KP), dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbinjabfung).

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Inspektur Wilayah IV dengan Inspektur Jenderal yang sekaligus merefleksikan upaya pemenuhan komitmen target kinerja kepada Pimpinan dan Pemangku Kepentingan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai wujud akuntabilitas kinerja untuk mendorong performa kinerja organisasi yang semakin baik.

Jakarta, 18 Januari 2024

Inspektur Wilayah IV



Vevie Damayanti

NIP. 19690104 199203 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, yaitu dalam meningkatkan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan mencakup 3 (tiga) perspektif Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja, yaitu *Customer Perspective*, *Business Process Prospective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja IKU Inspektorat Wilayah IV TA 2023

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023 mencapai 108,50 yang merupakan akumulasi capaian atas 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian tersebut telah memenuhi target dan bahkan di atas 100%. NCKO tahun 2023 sebesar 108,50. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,86 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,64. Hal ini disebabkan adanya kenaikan capaian pada IKU L1.1 di tahun 2023.

Sasaran strategis *Customer Perspective* didukung dengan IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV, yang mencapai realisasi sebesar 3,57 dari target 3 (skala 4), atau dengan capaian 119%. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran dari sejumlah kegiatan yang mendukung IKU C1.1 yaitu audit, reviu,



Pencapaian atas *Internal Business Process Perspective* telah melampaui target sebesar 102,77%. Pada perspektif tersebut meliputi 4 IKU, yaitu B1.1, B2.1, B.2.2, B2.3 yang secara keseluruhan capaian kinerjanya maksimal. Pencapaian atas 4 IKU tersebut didapat dari kegiatan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu atas Dokumen Keuangan, dan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit oleh APIP dan Pemeriksaan oleh BPK.

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Wilayah IV mendapat Pagu Anggaran awal sebesar Nilai tersebut lebih tinggi sebesar dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Pada TA 2023 telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain dengan diperolehnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan revisi POK karena keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan audit secara fisik pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan beberapa kegiatan pengawasan yang menjadi prioritas. Sampai dengan akhir TA 2023 total pagu sebesar dan telah direalisasikan sebesar atau mencapai 100%.

Capaian kinerja dan anggaran TA 2023 tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Inspektorat Wilayah IV memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kegiatan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategis	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024	5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1 Capaian Kinerja.....	8
C.1 Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	10
IKU C1.1 Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV.....	10
Deskripsi IKU	10
Informasi Kinerja	10
Perbandingan Kinerja.....	12
Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU	13
Kendala dan Tantangan	14
Upaya Perbaikan.....	14
Analisis Program Pendukung Capaian	14
Proyeksi ke depan	15
B.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri.....	18
IKU B.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.....	18
Deskripsi IKU	18
Informasi Kinerja	18
Perbandingan Kinerja.....	19

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU	20
Kendala dan Tantangan	21
Upaya Perbaikan.....	22
Analisis Program Pendukung Capaian	22
Proyeksi Ke depan.....	22
B. 2 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan	23
IKU B.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	24
Deskripsi IKU	24
Informasi Kinerja	24
Perbandingan Kinerja.....	25
Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU	25
Kendala dan Tantangan	26
Upaya Perbaikan.....	26
Analisis Program Pendukung Capaian	27
Proyeksi Ke depan.....	27
IKU B.2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.....	27
Deskripsi IKU	27
Informasi Kinerja	28
Perbandingan Kinerja.....	28
Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU	29
Kendala dan Tantangan	30
Upaya Perbaikan.....	30
Proyeksi Ke depan.....	30
Analisis Program Pendukung Capaian	31
IKU B.2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	31
Deskripsi IKU	31
Informasi Kinerja	31
Perbandingan Kinerja.....	32
Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU	33
Kendala dan Tantangan	33
Upaya Perbaikan.....	34
Analisis Program Pendukung Capaian	34

Proyeksi Ke depan	35
L. 1 Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah IV yang Baik	35
IKU L.1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	35
Deskripsi IKU	35
Informasi Kinerja	36
Perbandingan Kinerja	37
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU	37
Kendala dan Tantangan	38
Upaya Perbaikan	38
Analisis Program Pendukung Capaian	39
Proyeksi Ke depan	39
3.2 Realisasi Anggaran	40
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	42
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja	44
4.2 Kendala dan Tantangan	45
4.3 Proyeksi ke Depan	47
BAB V LAMPIRAN	49
5.1 Matriks Perjanjian Kinerja (PK)	49
5.2 Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi)	52
5.3 Matriks Informasi Kinerja	56
5.4 Matriks Perjenjangan Kinerja	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Inspektur Wilayah IV TA 2023	6
Tabel 2. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah IV TA 2022	7
Tabel 3. Perubahan Target IKU Tahun 2023	7
Tabel 4. Capaian dan Realisasi IKU Inspektorat Wilayah IV TA 2023.....	8
Tabel 5. Realisasi dan Capaian IKU C1.1.....	12
Tabel 6. Realisasi dan Capaian IKU B1.1	19
Tabel 7. Realisasi dan Capaian IKU B2.1	24
Tabel 8. Realisasi dan Capaian IKU B2.2	28
Tabel 9. Realisasi dan Capaian IKU B2.3	31
Tabel 10. Realisasi dan Capaian IKU L1.1	36
Tabel 11. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah IV TA 2023.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Capaian Kinerja IKU Inspektorat Wilayah IV TA 2023	ii
Gambar 2. Visi dan Misi Itjen, Visi dan Misi Inspektorat Wilayah IV	5
Gambar 3. Responden Survei Persepsi Kepuasan Berdasarkan Jenis Pengawasan.11	
Gambar 4. Nilai Rata-Rata Indeks Survei Persepsi Kepuasan Berdasarkan Jenis Pengawasan.....	12
Gambar 5. Perbandingan IKU C1.1 Tahun 2021 s.d 2023	12
Gambar 6. Dasbor Survei Presepsi Kepuasan Inspektorat Jenderal.....	15
Gambar 7. Kegiatan Audit KJRI Perth.....	16
Gambar 8. Kegiatan Audit KBRI Port Moresby	16
Gambar 9. Kegiatan Audit Satker Pusat	17
Gambar 10. Reviu RKA KL	17
Gambar 11. Perbandingan IKU B1.1 Tahun 2021 s.d 2023	20
Gambar 12. Kegiatan Evaluasi AKIP	23
Gambar 13. Formula Penghitungan IKU B2.1.....	23
Gambar 14. Perbandingan IKU B2.1 Tahun 2021 s.d 2023	24
Gambar 15. Perbandingan IKU B2.2 Tahun 2021 s.d 2023	29
Gambar 16. Perbandingan IKU B2.3 Tahun 2021 s.d 2023	32
Gambar 17. Perbandingan IKU L1.1 Tahun 2021 s.d. 2023.....	37
Gambar 18. Kegiatan Dialog Kinerja.....	39
Gambar 19. Telaah Sejawat	40
Gambar 20. Peta Jabatan Inspektorat Wilayah IV.....	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, tugas Inspektorat Wilayah IV adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Pasifik, Amerika dan Karibia, Unit Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah IV TA 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, terutama dalam pelaksanaan tugas pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah IV, dan merupakan implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenlu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Penyusunan LKj ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas atas tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Capaian kinerja yang diuraikan pada LKj ini didasarkan *Balanced Scorecard* (BSC), yang terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu *Customer Perspective*, *Business Process Prospective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

1.2 Aspek Strategis

Aspek Strategis Inspektorat Wilayah IV mengacu pada Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut didukung dengan sumber daya yang ada, meliputi: sumber daya manusia yang masih perlu diupayakan untuk peningkatan jumlah dan kompetensi, sumber daya keuangan yang perlu ditingkatkan jumlahnya mengingat pasca pandemi pelaksanaan pengawasan, dalam hal ini audit, seyogyanya telah kembali normal dimana pengawasan seluruhnya dilakukan secara fisik/luring.

Jumlah satuan kerja yang diampu oleh Inspektorat Wilayah IV sebanyak 46 (empat puluh enam) satuan kerja yang meliputi satuan kerja eselon I, eselon II, dan Perwakilan RI. Wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Pasifik, Amerika dan Karibia, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Dari sebaran satuan kerja tersebut, walaupun terdapat keterbatasan anggaran, namun Inspektorat wilayah IV telah mampu melakukan tugas pengawasan baik audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara optimal. Hal ini tercermin dari capaian atas indeks survei persepsi kepuasan pengguna layanan Inspektorat wilayah IV yang melebihi target.

Aspek strategis lainnya adalah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam organisasi yang mengikuti perkembangan kemajuan di bidang pengawasan sebagai penjamin mutu dan pendeteksi dini (*quality assurance and early warning system*).

Dalam peran sebagai konsultan, dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang memberikan kontribusi yang positif dalam pengambilan kebijakan Pimpinan dan berpengaruh kepada peningkatan kinerja Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Peran selaku konsultan dalam pendampingan kegiatan, antara lain:

- Penyampaian Masukan atas Draf Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelindungan Warga Negara Indonesia pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler untuk Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Rapat Koordinasi Anggaran Pelindungan bagi WNI terdampak gempa di Turki.
- Rapat Koordinasi Anggaran Pelindungan bagi WNI Terdampak Gempa di Suriah.
- Rapat Dit. PWNI terkait bantuan untuk KBRI Ankara.

- Pendampingan Penyusunan laporan SPIP Ditjen Protokol dan Konsuler.
- Reviu atas Usulan Bantuan Hibah untuk Rekonstruksi Rumah Sakit di Ukraina Tahun 2023.
- Verifikasi atas Permintaan Penggantian Biaya Penanganan Pelindungan 30 WNI terindikasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ho Chi Minh City.
- Pendampingan Pembahasan masalah Renovasi Wisma Kepri KJRI Chicago yang terbakar termasuk litigasi kontraktor lama.
- Pendampingan Evaluasi SPBE Kemenlu oleh Kemenpan RB.
- Pembahasan Pembayaran Diyat untuk WNI yang Divonis Hukuman Mati di KBRI Riyadh.
- Pendampingan Indonesia *Channel*.
- Rapat Pembahasan Situasi Darurat di Sudan.
- Pendampingan Pembahasan masalah Renovasi dan Restorasi Gedung KBRI Washington DC.
- Pembahasan Status Asosiasi Persahabatan Indonesia Turki dalam rencana Pembangunan “Kampung Indonesia”.
- Rapat Pemberian Fasilitas Dinas bagi Pegawai yang Ditempatkan Ditugaskan di Museum KAA Bandung.
- Rapat POKJA Perubahan Permenlu 07/A/KP/X/2006/01 tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Penyusunan Permenlu tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-287/D2/02/2023 tanggal 29 Desember 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri telah berhasil meningkatkan capaian *Internal Audit Capability Model* (IACM) Level 3 (Terintegrasi) yang pernah diperoleh pada tahun 2019. Hasil penilaian IACM tahun 2023 berada pada Level 3 dengan skor 3,100. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan level 3 (Terintegrasi) memiliki makna bahwa praktik profesional dan manajemen audit intern telah diterapkan secara seragam. Untuk itu APIP dalam melaksanakan pengawasan internal berbasis risiko telah mampu melaksanakan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Penerapan pengawasan internal berbasis risiko melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) berbasis risiko telah diterapkan sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 02603/PW/12/2017/11 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah IV Kementerian Luar Negeri, Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi organisasi Kementerian Luar Negeri khususnya pada aspek tata kelola pengawasan internal yang baik.

Berikut adalah Visi, Misi, serta Sasaran Strategis:

Gambar 2. Visi dan Misi Itjen, Visi dan Misi serta Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah IV

Visi & Misi Itjen	Visi & Misi Inspektorat Wilayah IV	Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah IV
<u>VISI:</u> Terwujudnya peran dan kapabilitas APIP yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong <u>MISI:</u> 1. Meningkatkan tata kelola pengawasan intern berbasis risiko dan digitalisasi pengawasan 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja. 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan konsultasi dan pendampingan guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja guna mendukung penerapan manajemen kinerja yang akuntabel di Satuan Kerja melalui fungsi evaluasinya selaku APIP 5. Meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan intern dan ekstern 6. Mendorong penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai target Pemerintah dalam RPJM 2020-2024	<u>VISI:</u> Terwujudnya peran dan kapabilitas APIP yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi Kementerian Luar Negeri Wilayah IV <u>MISI:</u> 1. Meningkatkan tata kelola pengawasan internal berbasis risiko dan digitalisasi pengawasan 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemangku kepentingan 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan konsultasi dan pendampingan guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemangku kepentingan 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja (<i>value for money</i>) 5. Meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan internal dan eksternal	<u>SASARAN STRATEGIS:</u> Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Wilayah IV yang berintegritas dan akuntabel

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah IV di Tahun 2023

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Inspektur Wilayah IV TA 2023

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV	3 (skala 4)
Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	68%
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	100%
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	95,50%
		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	87,50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah IV yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	79,50 (BB)

Tabel 2. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah IV TA 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		
Jumlah			

Berdasarkan PK TA 2023, berikut ini merupakan perubahan target kinerja antara tahun 2023 dan 2022:

Tabel 3. Perubahan Target IKU Tahun 2023

IKU	Tahun 2022	Tahun 2023
B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	55%	68%
B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	95%	95,50%
B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	87%	87,50%

Dari data di atas, terdapat peningkatan target kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 yang diperoleh pada tahun 2022 sehingga menjadi evaluasi untuk perbaikan perencanaan target kinerja di tahun 2023. Sebagai catatan, sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan manual IKU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

NCKO Inspektorat Wilayah IV TA 2023 sebesar 108,50 merupakan nilai penghitungan dari capaian 6 (enam) IKU TA 2023. NCKO TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,86 dibandingkan dengan NCKO TA 2022 sebesar 105,64.

Tabel 4. Capaian dan Realisasi IKU Inspektorat Wilayah IV TA 2023

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Customer Perspective						
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV	3 (skala 4)	3,57	119%
Business Process Perspective						
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	68%	68,91%	101,33%
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidi dokumen keuangan pada wilayah kerja	100%	100%	100%

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi	Capaian
	Terjadinya Risiko Permasalahan		Inspektorat Wilayah IV			
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	95,50%	96,44%	100,98%
		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	87,50%	97,70%	111,66%
Learning & Growth Perspective						
L1	Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah IV yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	79,50 (BB)	79,70 (BB)	100,25%

Pada TA 2023 Inspektorat Wilayah IV mendapatkan pagu anggaran awal sebesar . Namun, pada tahun anggaran berjalan terdapat revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan sampai dengan akhir tahun 2023 dan berbagai kegiatan *pop up* pada tahun 2023 yang prioritas untuk dilaksanakan. Revisi Anggaran Tahun 2023 dilakukan melalui pengajuan usulan tambahan anggaran sebesar pada bulan September, dan 12 kali revisi POK untuk meningkatkan capaian kinerja dan anggaran.

Anggaran Inspektorat Wilayah IV TA 2023 setelah revisi anggaran menjadi sebesar dengan serapan anggaran sampai akhir TA 2023 sebesar atau mencapai 99,99% atau pembulatan menjadi 100%.

C.1 Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV dalam bidang pengawasan, maka sasaran strategis yang berusaha dicapai adalah pengawasan yang berintegritas, konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap pemangku kepentingan Inspektorat Wilayah IV.

Dalam mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan IKU untuk mendukung, yaitu:

IKU C1.1 Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

IKU ini merupakan ukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan dan tingkat kepuasan atas manfaat yang diterima dari pelayanan pengawasan. Layanan pengawasan yang dimaksud adalah untuk setiap kegiatan audit, review, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diberikan kepada satuan kerja Pusat dan Perwakilan RI.

Informasi Kinerja

Atas penyempurnaan terhadap sistem survei persepsi Inspektorat Jenderal pada tahun 2022, telah memberikan dampak terhadap hasil survei karena penyederhanaan pertanyaan survei yang mempermudah responden dalam melakukan pengisian survei di aplikasi melalui <https://kem.lu/surveipersepsi23>. Kategori responden yang mengisi aplikasi terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Kanselerai, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Penata Kanselerai (Bendahara Pengeluaran), Manajer Kinerja Perwakilan (MKP) untuk Satker Perwakilan, sedangkan responden pada Satker Pusat terdiri dari KPA, PPK, Bendahara, Manajer Kinerja Organisasi (MKO)/Sub-Manajer Kinerja Organisasi (SMKO), dan pejabat lainnya.

Berikut formula penghitungan realisasi IKU C1.1

$$\% \text{ Realisasi} = \text{Rata-rata Indeks Kepuasan terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah IV}$$

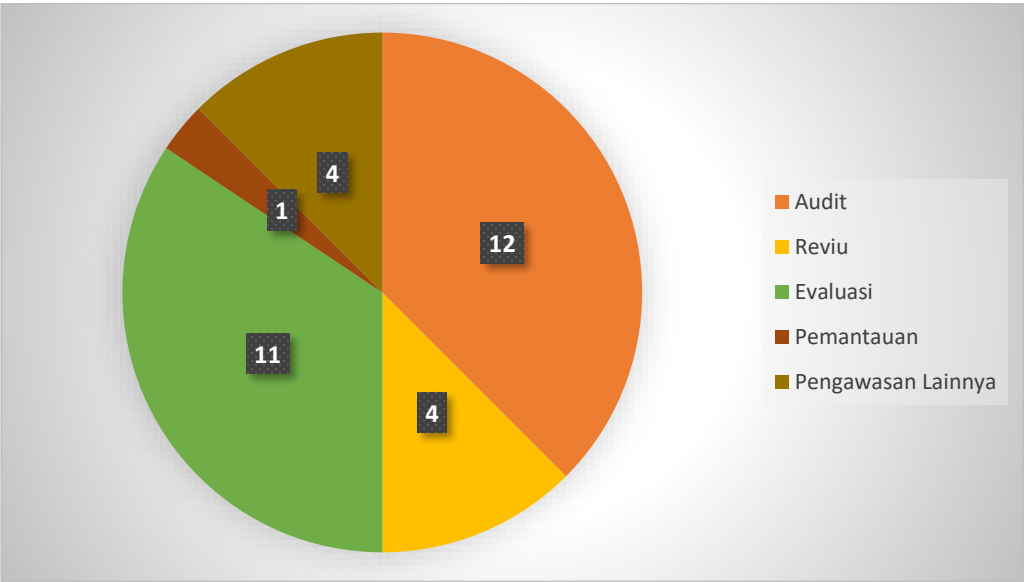
Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU C1.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi dan Capaian IKU C1.1

IKU C1.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV	Hasil survei kepuasan atas layanan kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya oleh satuan kerja Pusat dan Perwakilan RI yang menerima pelayanan	
Total Realisasi		3,57
Target		3 (skala 4)
Capaian		119%

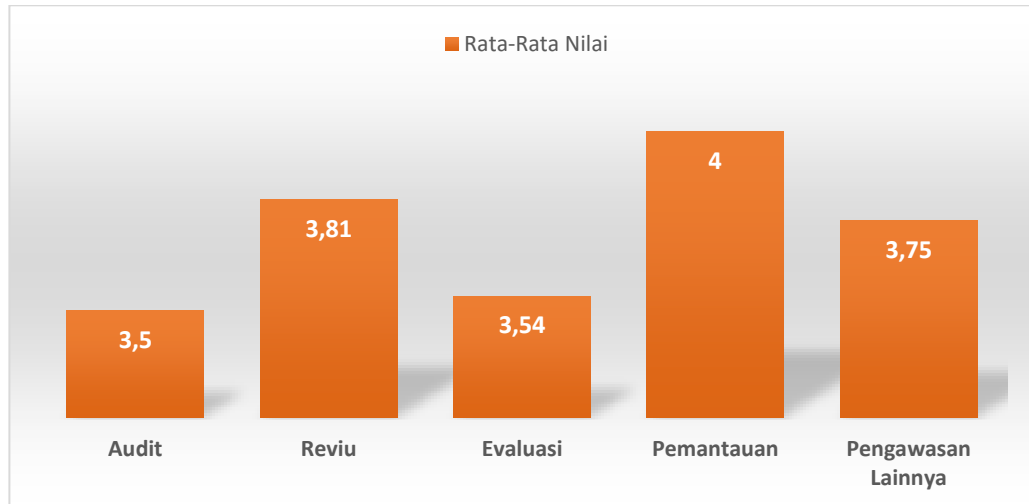
Nilai Realisasi pada tahun 2023 didapatkan dari 32 responden yang terbagi dalam kegiatan pengawasan sebagai berikut:

Gambar 3.Responden Survei Persepsi Kepuasan Berdasarkan Jenis Pengawasan



Responden terbanyak didapat untuk kegiatan audit sebanyak 12 responden dan responden yang paling sedikit untuk kegiatan pemantauan sebanyak 1 responden. Berdasarkan pembagian responden tersebut didapatkan nilai rata-rata Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV untuk setiap pengawasan sebagai berikut:

Gambar 4. Nilai Rata-Rata Indeks Survei Persepsi Kepuasan Berdasarkan Jenis Pengawasan



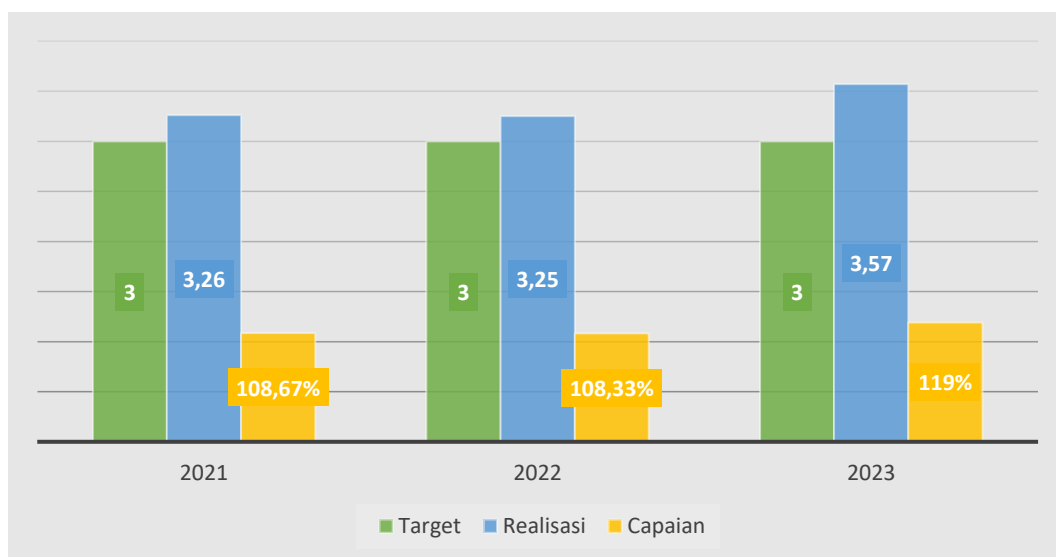
Rata-rata nilai tertinggi ada pada kegiatan pemantauan sebesar 4, sedangkan nilai terendah didapat pada kegiatan audit sebesar 3,5. Hal ini mencerminkan bahwa upaya Inspektorat Wilayah IV telah mendorong Satker untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan APIP dan BPK. Untuk hasil survei pada kegiatan reviu sebesar 3,81 menunjukkan bahwa peningkatan *feedback* positif dari *stakeholders* telah seiring dengan peningkatan layanan kegiatan reviu karena tingginya permintaan reviu revisi anggaran yang diajukan oleh Satker/ Perwakilan. Sedangkan hasil survei untuk kegiatan audit sebesar 3,5 menunjukkan adanya harapan Satker terhadap APIP untuk meningkatkan pengawasan atas tata kelola Satker di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Perbandingan Kinerja

Gambar 5. Perbandingan IKU C1.1 Tahun 2021 s.d 2023

IKU C1.1	2021	2022	2023
Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV			
Target	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
Realisasi	3,26	3,25	3,57
Capaian	108,67%	108,33%	119%

Gambar 4. Perbandingan IKU C1.1 Tahun 2021 s.d 2023



Capaian IKU C1.1 TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 10.67% menjadi 119%. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya nilai rata – rata survei kepuasan untuk kegiatan reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Meskipun capaian IKU C1.1 pada TA 2023 mengalami peningkatan, namun jika dilihat berdasarkan jumlah responden, terdapat penurunan jumlah responden sebanyak 24 responden dari tahun 2022 sebanyak 56 responden menjadi 32 responden di tahun 2023. Turunnya keterlibatan responden pada tahun 2023 dalam pengisian survei tidak mempengaruhi hasil penilaian atas layanan kegiatan pengawasan internal. Capaian hasil survei persepsi pemangku kepentingan menyatakan puas atau skala 3,57, terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 3 (skala 4).

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Penyebaran kuesioner untuk IKU C1.1 dilakukan untuk seluruh kegiatan layanan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Capaian IKU C1.1 sebesar 3,57 pada tahun 2023 lebih tinggi 0,32 dari tahun 2022 sebesar 3,25 dan 2021 sebesar 3,26. Peningkatan ini mencerminkan peran Inspektorat Wilayah IV dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan telah memberikan dampak atas menguatnya tata kelola dan pengendalian intern pada Satker di wilayah kerja.

Kendala dan Tantangan

Kendala dalam pencapaian target IKU C1.1, yaitu:

1. Terdapat keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan pengawasan intern khususnya pada kegiatan audit secara fisik ke Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini telah menjadi perhatian karena selama 3 tahun sejak masa pandemi audit dilaksanakan secara daring yang mana sangat mempengaruhi kualitas hasil audit. Audit secara daring sulit meyakini keabsahan dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan karena telaah dokumen hanya terbatas melalui dokumen scan yang berpotensi dapat diubah. Keterbatasan anggaran juga tidak hanya dialami untuk kegiatan audit namun juga pada kegiatan revidi khususnya permasalahan PFK Minus dan permasalahan pembukuan Perwakilan yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Kemenlu.
2. Kurangnya keterlibatan responden survei;
3. Waktu penyebaran kuesioner yang terbatas di Triwulan III dan IV; dan
4. Tidak terupdatenya hasil survei.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan kendala tersebut, antara lain:

1. Kedepannya, kegiatan pengawasan intern perlu didukung dengan anggaran yang memadai khususnya untuk kegiatan audit secara fisik dan revidi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian intern organisasi Kemenlu;
2. Mendorong dan mengingatkan Satuan Kerja untuk mengisi survei persepsi kepuasan pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah IV;
3. Melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja terkait pengisian survei persepsi; dan
4. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk hasil survei secara berkala.

Analisis Program Pendukung Capaian

Pada IKU C1.1, terdapat hal-hal yang mendukung capaian kinerja, antara lain:

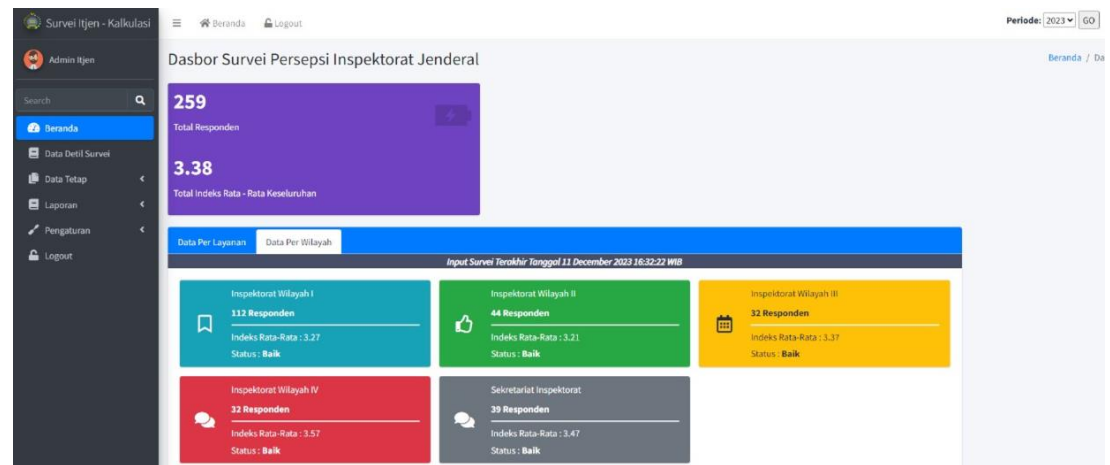
1. Menyiapkan *link cloud/drive* Kemenlu untuk mengakomodir data dokumen yang disampaikan oleh Satker;
2. Melakukan koordinasi lintas Satker untuk memperoleh masukan komprehensif terkait kegiatan pengawasan intern;

3. Penetapan SDM dalam tim pengawasan secara proporsional; dan
4. Melakukan reviu secara berjenjang terhadap seluruh proses pelaporan maupun kertas kerja pendukung kegiatan pengawasan intern.

Proyeksi ke depan

Melalui hasil evaluasi atas upaya perbaikan di atas, diharapkan pada tahun 2024 capaian dan nilai realisasi IKU C1.1 semakin meningkat termasuk keterlibatan jumlah responden yang melakukan pengisian survei. Hasil survei sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 6. Dasbor Survei Persepsi Kepuasan Inspektorat Jenderal



Gambar 7. Kegiatan Audit KJRI Perth



Gambar 8. Kegiatan Audit KBRI Port Moresby



Gambar 9. Kegiatan Audit Satker Pusat



Gambar 10. Kegiatan Reviu RKA K/L



B.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV dalam bidang pengawasan maka sasaran strategis yang berusaha dicapai adalah adanya peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja yang efektif pada setiap satuan kerja yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Wilayah IV.

IKU yang mendorong terwujudnya Sasaran Strategis B1 adalah sebagai berikut:

IKU B.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP adalah rekomendasi yang diberikan oleh APIP yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP atas Laporan Kinerja Satuan Kerja pada TA 2022.

Informasi Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenlu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, Evaluasi AKIP tahun 2022 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) Unit Organisasi (Satker tingkat Eselon I, Eselon II dan Perwakilan RI).

Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti akan dihitung persentasenya dibandingkan dengan total rekomendasi yang telah diberikan.

Penghitungan IKU B1.1 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU B1.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi dan Capaian IKU B1.1

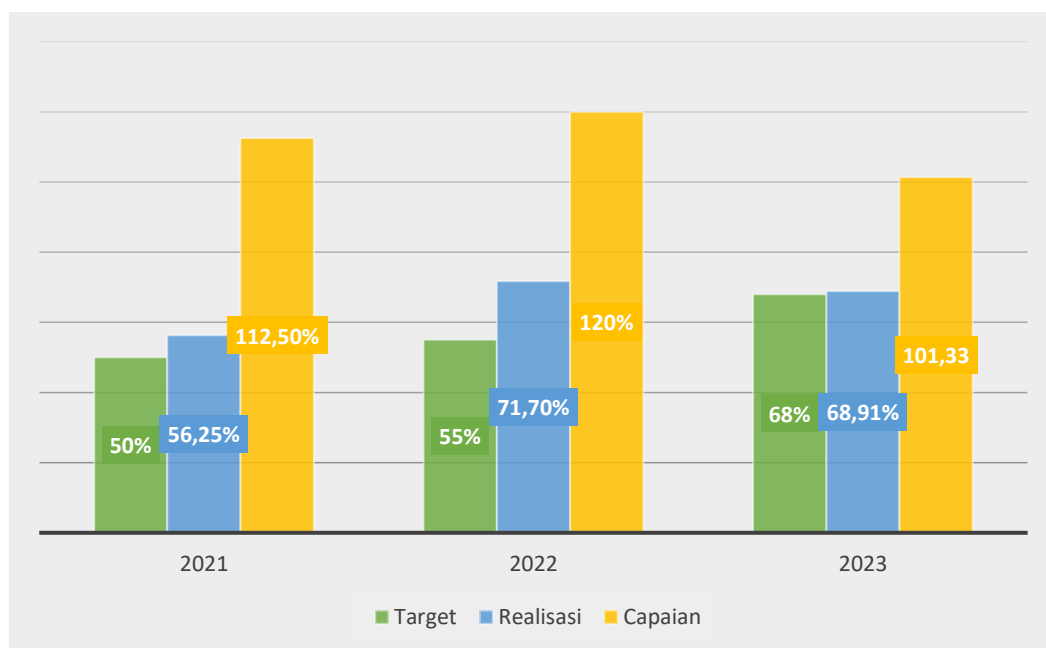
IKU B1.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja atas hasil evaluasi Sistem Implementasi AKIP TA 2022	
Total Realisasi		68,91%
Target		68%
Capaian		101,33%

Nilai Realisasi pada tahun 2023 didapatkan dari 34 Satuan Kerja yang telah menyampaikan tindak lanjut rekomendasi dan menyelesaikan 164 dari total 238 rekomendasi yang diberikan.

Perbandingan Kinerja

IKU B1.1	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV			
Target	50%	55%	68%
Realisasi	56,25%	71,7%	68,91%
Capaian	112,50%	120%	101,33%

Gambar 11. Perbandingan IKU B1.1 Tahun 2021 s.d 2023



Pada tahun 2023, terdapat peningkatan target IKU B1.1 sebesar 13% menjadi 68% dibandingkan tahun 2022 sebesar 55%. Kenaikan target kinerja di tahun 2023 ditandai dengan pemenuhan nilai realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP sebesar 68,91% sehingga persentase capaian IKU B1.1 adalah sebesar 101,33%. *Trend* target mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Penyebab keberhasilan peningkatan akuntabilitas kinerja yang efektif ditandai dengan kegiatan pengawasan pada IKU B1.1, yaitu rewiu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

1. Evaluasi AKIP

Inspektorat Wilayah IV melaksanakan evaluasi AKIP Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenlu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) Unit Organisasi (Satker tingkat Eselon I, Eselon II dan Perwakilan RI). Sesuai Permenlu Nomor 7 tahun 2021, setiap Satker diharapkan menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi AKIP paling lambat pada 1 November tahun berjalan. Untuk itu, Inspektorat Jenderal mengingatkan seluruh Satker Pusat dan Perwakilan untuk menindaklanjuti hasil Evaluasi AKIP melalui Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2023 dan Berita Biasa tanggal 28 Oktober 2023.

Komunikasi yang efektif dengan satker menghasilkan umpan balik terhadap penyampaian hasil evaluasi AKIP, sehingga mempengaruhi peningkatan capaian kinerja pada IKU B1.1.

2. Reviu Laporan Kinerja

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan reviu atas LKj Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 bersama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO). Kegiatan reviu LKj dilakukan simultan dengan penyusunan LKj Kementerian Luar Negeri sebelum ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan disampaikan kepada Kemenpan RB. Tim reviu dibentuk oleh Inspektorat Jenderal yang beranggotakan perwakilan auditor dari Inspektorat Wilayah dan perwakilan dari BPO. Dalam pelaksanaannya, Tim reviu melakukan klarifikasi dengan pihak pengampu IKU, sehingga reviu LKj terlaksana dengan efektif dan rekomendasi perbaikan atas LKj dapat segera ditindaklanjuti oleh Satker pengampu IKU.

Kegiatan reviu LKj Kementerian Luar Negeri berkaitan erat dengan siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga kegiatan ini merupakan *output* anggaran pada IKU B1.1.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU B1.1, yaitu:

1. Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI belum optimal melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP,

sehingga sebagian rekomendasi tahun sebelumnya masih muncul dan menjadi rekomendasi di tahun berikutnya;

2. Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI belum/terlambat menyampaikan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP sesuai dengan Permenlu Nomor 7 Tahun 2021, yaitu paling lambat 1 November tahun berjalan; dan
3. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi sistem AKIP yang belum optimal.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan untuk pencapaian target IKU B1.1 menjadi lebih baik, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI dalam rangka mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi secara tepat waktu;
2. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang andal dalam penatausahaan administrasi dan pemantauan tindak lanjut; dan
3. Meningkatkan peran masing – masing pemegang *desk* untuk memonitor tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut AKIP.

Analisis Program Pendukung Capaian

Pada IKU B1.1, terdapat hal- hal yang mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan koordinasi langsung dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI untuk menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk penyampaian mengenai permintaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP kepada Satuan Kerja.

Proyeksi Ke depan

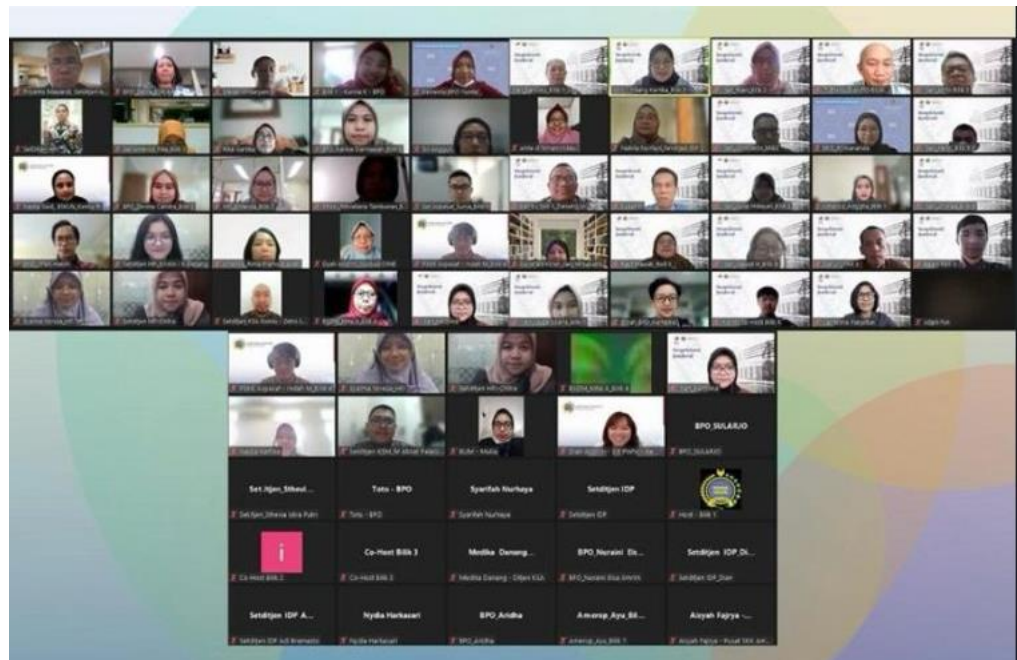
Pada Tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV akan:

- a) meningkatkan kemampuan evaluator melalui pembekalan bimbingan teknis dalam melakukan evaluasi AKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- b) menguatkan mekanisme klarifikasi dan wawancara dengan Satker; dan
- c) meningkatkan peran masing – masing pemegang *desk* untuk memonitoring tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut AKIP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas evaluasi AKIP tahun berikutnya.

Gambar 12. Kegiatan Evaluasi AKIP



B. 2 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko merupakan kegiatan pengawasan yang dapat mendorong terwujudnya capaian pada Sasaran Strategis B2, yaitu IKU B2.1, IKU B2.2, dan IKU B2.3, sebagai berikut:

IKU B.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

Rekomendasi adalah saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor kepada Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI atas dokumen keuangan yang direviu.

Informasi Kinerja

Kegiatan reviu dokumen keuangan yang termasuk ke dalam IKU B2.1 adalah Reviu Laporan Keuangan, dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti akan dihitung persentasenya dibandingkan dengan total rekomendasi yang telah diberikan.

Penghitungan IKU B2.1, sebagai berikut:

Gambar 13. Formula Penghitungan IKU B2.1

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU B2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi dan Capaian IKU B2.1

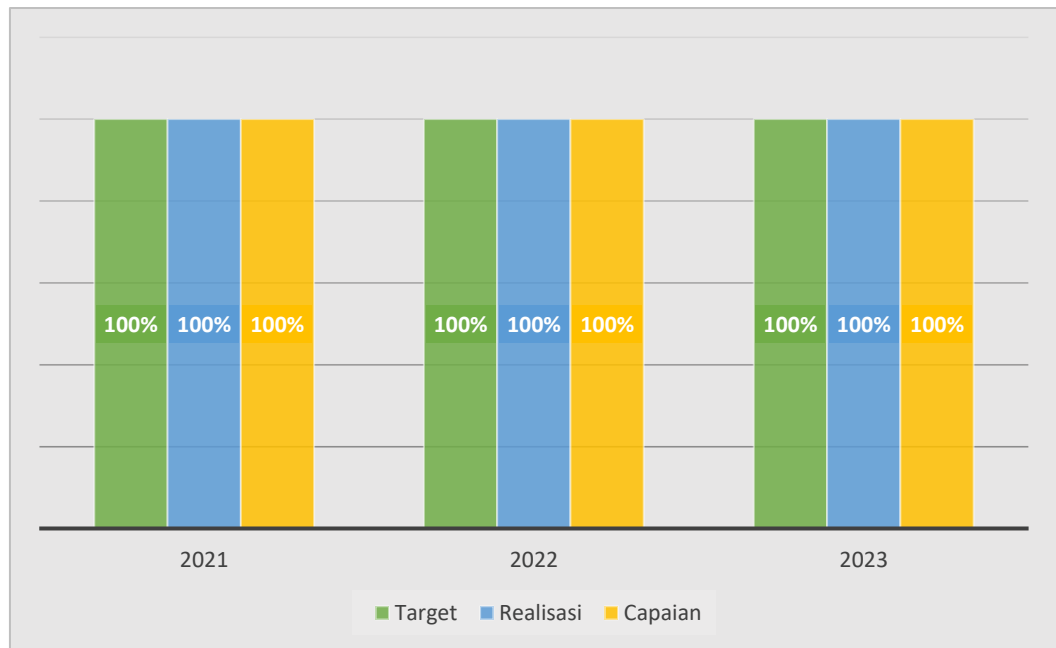
IKU B2.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Rekomendasi atas reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja	
Total Realisasi		100%
Target		100%
Capaian		100%

Nilai Realisasi pada tahun 2023 didapatkan dari telah ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi dari total 476 rekomendasi atas reviu Laporan Keuangan Semester II TA 2022, Semester I TA 2023 dan Reviu RKA-K/L TA 2024. Penghitungan ini sesuai dengan manual IKU B2.1:

Perbandingan Kinerja

IKU B2.1	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV			
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%

Gambar 14. Perbandingan IKU B2.1 Tahun 2021 s.d 2023



Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah IV berhasil mempertahankan nilai capaian IKU B2.1 berada pada capaian 100% seperti tahun 2022. Inspektorat Wilayah IV akan terus berupaya dalam mendorong para pemangku kepentingan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Penyebab keberhasilan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara, serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan, dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Satker terkait dalam kegiatan:

1. Reviu atas Laporan Keuangan;

2. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) TA 2024; dan
3. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025.

Selain itu, terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam manual IKU, namun telah dilaksanakan kegiatannya, yaitu:

1. Reviu atas usulan revisi anggaran satuan kerja pusat dan perwakilan TA 2023;
2. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I-IV TA 2023;
3. Telaah Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK) Satker Pusat dan Perwakilan dalam kaitan reviu Laporan Keuangan;
4. Reviu Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penginputan pada aplikasi e-mawas Kemenkeu; dan
5. Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reviu yang efektif, Inspektorat Wilayah IV meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan klarifikasi dengan Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Perwakilan RI sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Melalui kegiatan reviu ini, Inspektorat Wilayah IV telah berhasil mendorong satker untuk meningkatkan kualitas penyusunan LK, RKA-K/L, dan RKBMN. Hal ini tercermin dengan semakin meningkatnya kualitas dokumen keuangan satker pusat dan perwakilan.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU B2.1, yaitu:

1. Satuan Kerja belum optimal melakukan tindak lanjut atas rekomendasi reviu dokumen keuangan, sehingga masih terdapat rekomendasi atas reviu tahun sebelumnya yang tetap muncul menjadi rekomendasi di tahun 2023; dan
2. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas reviu dokumen keuangan yang belum optimal.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan dalam pencapaian target IKU B2.1, yaitu:

1. meningkatkan koordinasi dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI dalam rangka mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan; dan
2. meningkatkan sistem pengendalian internal yang andal dalam penatausahaan administrasi dan pemantauan tindak lanjut.

Analisis Program Pendukung Capaian

Inspektorat Wilayah IV senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI dalam rangka mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan.

Sebagai informasi, terdapat beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan revidu dokumen keuangan yang mendukung capaian IKU B2.1 namun belum diakomodir pada Manual IKU, yaitu:

1. Revidu atas usulan revisi anggaran satuan kerja pusat dan perwakilan TA 2023;
2. Revidu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I-IV TA 2023;
3. Telaah Berita Acara Pemeriksaan Kas dalam rangka revidu Laporan Keuangan;
4. Revidu Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui aplikasi e-Mawas Kementerian Keuangan; dan
5. Revidu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Proyeksi Ke depan

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV berkomitmen untuk meningkatkan capaian dan nilai realisasi IKU B2.1, serta melakukan perbaikan Manual IKU.

IKU B.2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

Rekomendasi hasil audit APIP merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor kepada Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI atas audit yang dilakukan oleh APIP.

Informasi Kinerja

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP yang dihitung pada IKU B2.2 tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut audit sejak tahun 2010 sampai dengan 2023.

Penghitungan realisasi untuk IKU B2.2, sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU B2.2, sebagai berikut

Tabel 8. Realisasi dan Capaian IKU B2.2

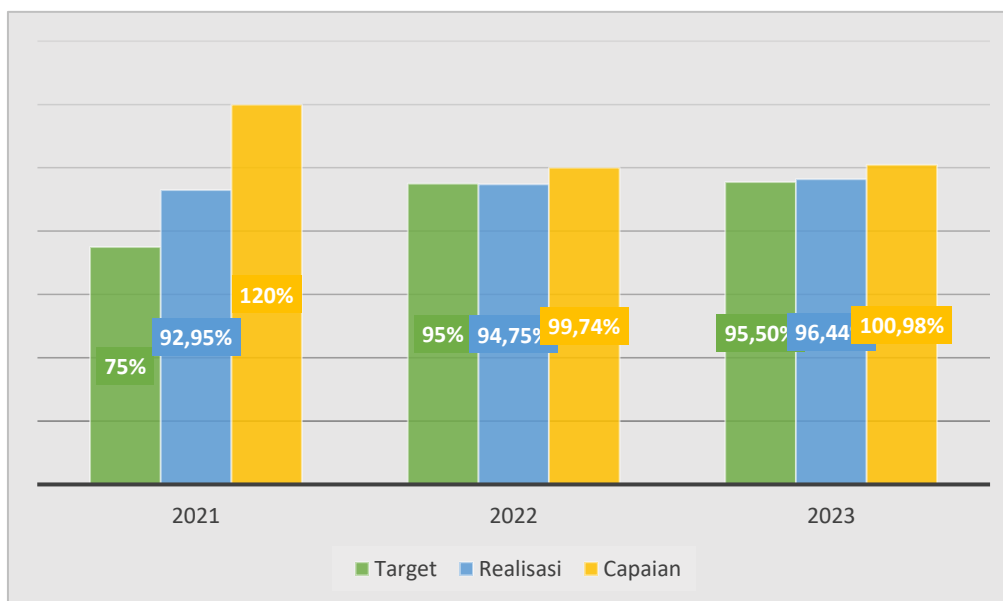
IKU B2.2	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Rekomendasi atas hasil audit APIP yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja	
Total Realisasi		96,44%
Target		95,50%
Capaian		100,98%

Nilai Realisasi pada tahun 2023 didapatkan dari telah ditindaklanjutinya 921 rekomendasi dari total 955 rekomendasi audit APIP sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan target sebesar 0,5% dari tahun 2022 sebesar 95% menjadi 95,50%. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong Satker melakukan tindak lanjut rekomendasi melalui komunikasi dan koordinasi intensif.

Perbandingan Kinerja

IKU B2.2	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV			
Target	75%	95%	95,50%
Realisasi	92,95%	94,75%	96,44%
Capaian	120%	99,74%	100,98%

Gambar 15. Perbandingan IKU B2.2 Tahun 2021 s.d. 2023



Berdasarkan data diatas, capaian kinerja IKU B2.2 mengalami fluktuasi dari tahun 2021 (120%), 2022 (99,74%), dan 2023 (100,98%). Hal ini dikarenakan terdapat perubahan target IKU pada tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi atas realisasi IKU tahun 2021 yang melonjak tajam realisasinya yaitu 120%. Sedangkan realisasi tahun 2022 tidak dapat mencapai target karena terdapat rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti (jangka panjang). Terkait hal ini, telah pernah dilakukan pembahasan untuk menyusun pedoman/rujukan hukum atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti namun pembahasan mengenai hal tersebut belum dilanjutkan kembali. Hal ini turut menyumbang realisasi tidak mencapai target.

Sedangkan, bila dibandingkan capaian IKU B2.2 dari tahun 2022 ke tahun 2023, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 1,24% dari sebelumnya 99,74% (2022) menjadi 100,98% (2023). Hal ini membuktikan bahwa hasil evaluasi atas mekanisme koordinasi telah diperkuat melalui komunikasi dan itikad baik dari Satker untuk segera menindaklanjuti temuan APIP agar tidak berlanjut ke periode berikutnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit oleh APIP, Inspektorat Wilayah IV membentuk Tim Tindak Lanjut (TL) yang bertugas mengumpulkan data hasil pemantauan dan memandu proses rekonsiliasi dengan Setitjen. Kegiatan rekonsiliasi atas monitoring tindak lanjut di tahun 2023

seharusnya dilaksanakan setiap triwulan, namun terdapat kendala sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan setiap triwulan. Tim Tindak Lanjut rekomendasi audit APIP di Wilayah IV tetap berupaya melakukan komunikasi dengan Satker terkait untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU B2.2, yaitu:

1. Satker kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit terkait dengan tanggung jawab pengembalian ke Kas Negara oleh pihak ketiga/penyedia jasa;
2. Satker belum optimal dalam penggunaan aplikasi SIPIK dan tingkat pergantian/mutasi pegawai yang tinggi pada Unit Organisasi/Satuan Kerja/ Perwakilan RI; dan
3. Kesulitan menelusuri data *Home Staff/Local Staff* terkait residu temuan tahun-tahun sebelumnya, serta adanya pegawai yang pensiun/mengundurkan diri.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan pencapaian target IKU B2.2, yaitu:

1. Melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Setitjen, serta meningkatkan koordinasi dan mendorong agar Satker segera menindaklanjuti rekomendasi audit;
2. Mendorong Satker agar lebih optimal dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal Kementerian Luar Negeri (SIPIK) untuk keakuratan dan kemudahan pemantauan tindak lanjut temuan APIP; dan
3. Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk penelusuran data *Home Staff/Local Staff* terkait temuan.

Proyeksi Ke depan

Inspektorat Wilayah IV akan melakukan penguatan koordinasi dengan Satker untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP, sehingga capaian kinerja optimal.

Analisis Program Pendukung Capaian

Inspektorat Wilayah IV telah melakukan koordinasi kepada Satker melalui aplikasi SIPIK dan juga berkomunikasi secara langsung dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI dalam rangka mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan.

IKU B.2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK atas hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Informasi Kinerja

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PD TT) dan Pemeriksaan Kinerja sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2023.

Penghitungan realisasi untuk IKU B.2.3 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, realisasi kinerja IKU B.2.3 adalah sebagai berikut

Tabel 9. Realisasi dan Capaian IKU B.2.3

IKU B.2.3	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Rekomendasi atas hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja	
Total Realisasi		97,70%
Target		87,50%
Capaian		111,66%

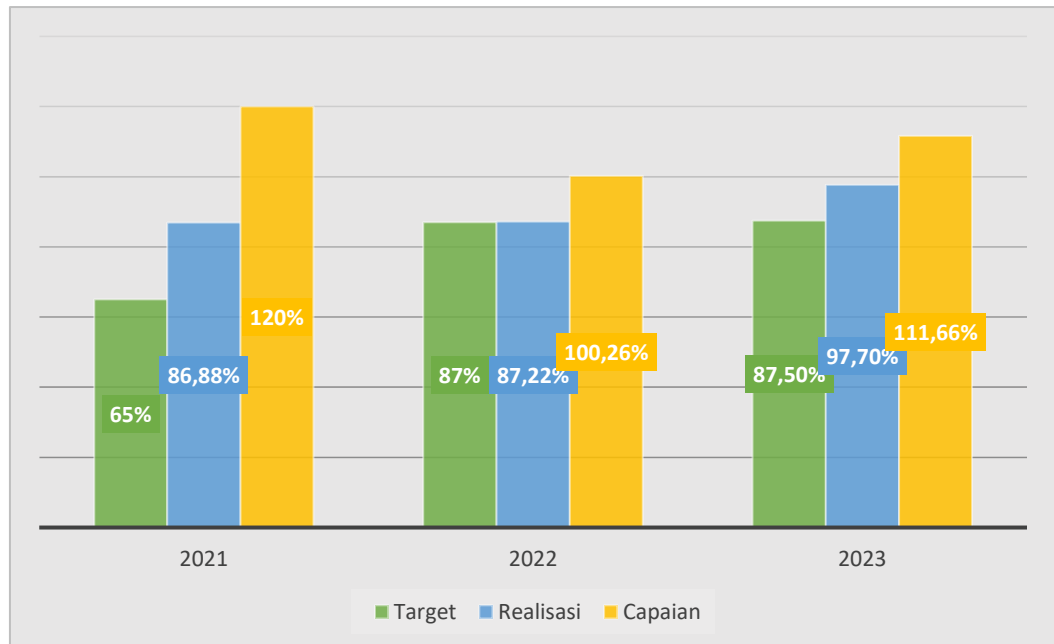
Nilai Realisasi pada tahun 2023 diperoleh dari telah ditindaklanjutinya 552 rekomendasi dari total 565 rekomendasi pemeriksaan BPK untuk PDDT dan Pemeriksaan Kinerja sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan naik sebesar 0,5% dari tahun 2022 dari 87% menjadi 87,50%. Alasan kenaikan penetapan target merupakan hasil evaluasi atas capaian tahun sebelumnya, serta komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Perbandingan Kinerja

IKU B2.3	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV			
Target	65%	87%	87,50%
Realisasi	86,88%	87,22%	97,70%
Capaian	120%	100,26%	111,66%

Gambar 16. Perbandingan IKU B2.3 Tahun 2021 s.d. 2023



Berdasarkan data perbandingan diatas, capaian kinerja IKU B2.3 mengalami fluktuasi dari tahun 2021 (120%), 2022 (100,26%), dan 2023 (111,66%). Hal ini dikarenakan terdapat perubahan target IKU pada tahun 2022 dan 2023 yang merupakan hasil evaluasi atas realisasi IKU tahun 2021 yang melonjak tajam realisasinya yaitu 120%. Sedangkan realisasi tahun 2022 dan 2023 sulit mencapai target karena terdapat rekomendasi yang belum memenuhi persyaratan

rekomendasi, serta belum dibahasnya kebijakan atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Satker. Hal ini akan menjadi evaluasi dalam perencanaan target IKU B2.3 ke depannya.

Namun demikian, bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023, maka terdapat peningkatan sebesar 11,40% dari sebelumnya 100,26% menjadi 111,66%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IKU

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit oleh BPK, Inspektorat Wilayah IV membentuk Tim Tindak Lanjut (TL) yang bertugas mengumpulkan data hasil pemantauan dan membahas hasil tindak lanjut pada tahap rekonsiliasi dengan para pemangku kepentingan. Rekonsiliasi dilakukan setiap semester, yaitu rekonsiliasi internal dengan Inspektorat Jenderal, maupun rekonsiliasi dengan pihak pemangku kepentingan. Rekonsiliasi internal dimaksud dilakukan bersama Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan (BOAHP) Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan memperbaharui database pada aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Dengan dibentuknya Tim TL dan pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin, proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain rekonsiliasi internal, dilakukan juga rekonsiliasi eksternal dengan BPK terkait dokumen pendukung tindak lanjut. BPK akan melakukan verifikasi/telaah terhadap dokumen tindak lanjut untuk dipilah statusnya sebagai tindak lanjut yang dianggap selesai maupun masih memerlukan dokumen tambahan (masih dalam proses).

Kegiatan lainnya yang mendukung IKU B2.3 antara lain rapat koordinasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang dilaksanakan setiap semester di tahun 2023, penyampaian perkembangan kasus yang masih dalam proses dan tindak lanjut rekomendasi hasil rapat TPKN periode sebelumnya serta penyampaian kasus baru yang perlu diputuskan TPKN.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU B2.3, yaitu:

1. Kesulitan penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan pihak ketiga/penyedia jasa;

2. Kesulitan menelusuri data *Home Staff/Local Staff* khususnya untuk temuan yang sudah lama;
3. Satker kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi terkait TP TGR dikarenakan terdapat pegawai yang telah pensiun, mutasi, dan meninggal dunia;
4. Dokumen LHP BPK hanya menyebutkan inisial pegawai sehingga kesulitan dalam penelusuran; dan
5. Verifikasi tindak lanjut rekomendasi oleh BPK memerlukan waktu yang lama untuk dapat dinyatakan selesai atau masih dalam proses.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Inspektorat Wilayah IV akan melakukan langkah-langkah agar pencapaian target IKU B2.3 semakin meningkat:

1. Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut secara periodik dengan BPK, koordinasi intensif dengan BOAHP Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta memastikan rencana penggunaan opsi “tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah” dapat dilakukan ketika proses penagihan sudah maksimal dan terdapat hal yang tidak bisa ditagihkan kepada penanggung jawab;
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Tindak Lanjut Sistem Informasi Pengawasan Internal Kementerian Luar Negeri (SIPIK), dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk keakuratan dan kemudahan pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK;
3. Meningkatkan koordinasi dengan BSDM atau perwakilan terkait nama-nama inisial yang ada di temuan LHP BPK; dan
4. Meningkatkan komunikasi dengan Satker terkait, melalui brafaks, surat maupun komunikasi melalui *WhatsApp* guna penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.

Analisis Program Pendukung Capaian

Hal-hal yang mendukung program untuk mencapai kinerja IKU B2.3, yaitu:

1. Tim Tindak Lanjut BPK Inspektorat Wilayah IV berkoordinasi dengan Satker/Perwakilan terkait rekomendasi temuan pada LHP BPK;
2. Memanfaatkan aplikasi SIPTL untuk monitor pemantauan tindak lanjut; dan

3. Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut per semester dengan BPK, dan bekerja sama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Proyeksi Ke depan

Inspektorat Wilayah IV akan melakukan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Satker untuk mendorong penyelesaian rekomendasi temuan, memastikan tindak lanjutnya *ter-update* secara berkesinambungan dalam aplikasi SIPTL, serta merencanakan target IKU yang tepat sehingga tidak terdapat reduksi capaian kinerja.

L. 1 Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah IV yang Baik

Inspektorat Wilayah IV merupakan bagian dari satuan kerja di Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan internal. Keberhasilan Inspektorat Wilayah IV dalam mencapai sasaran strategis tata kelola organisasi yang baik sebagai satker akan mendukung pencapaian tata kelola organisasi yang baik pada level Kementerian.

IKU untuk mendorong tercapainya sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

IKU L.1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV

Deskripsi IKU

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Evaluasi AKIP mencakup seluruh proses pengelolaan kinerja organisasi yang dilaksanakan secara baik dan akuntabel pada satu siklus kinerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi. Dalam hal ini, penyusunan dokumen AKIP seperti Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj), merupakan komponen-komponen penting dalam mewujudkan pengelolaan kinerja organisasi yang akuntabel.

Informasi Kinerja

Sesuai dengan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan bobot, yaitu:

1. Perencanaan kinerja sebesar 30%;
2. Pengukuran kinerja sebesar 30%;
3. Pelaporan kinerja sebesar 15%; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 25%.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja IKU L1.1 adalah sebagai berikut

Tabel 10. Realisasi dan Capaian IKU L1.1

IKU L1.1	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	Penilaian Evaluasi atas Implementasi AKIP Inspektorat Wilayah IV	
Total Realisasi		79,7 (BB)
Target		79,5 (BB)
Capaian		100,25%

Nilai Realisasi pada tahun 2023 diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah IV TA 2022 terhadap 4 komponen penilaian. Hasil penilaian disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur Wilayah III kepada Inspektur Wilayah IV Nomor 28799/PW/07/2023/70 tanggal 12 Juli 2023 dengan hasil, sebagai berikut:

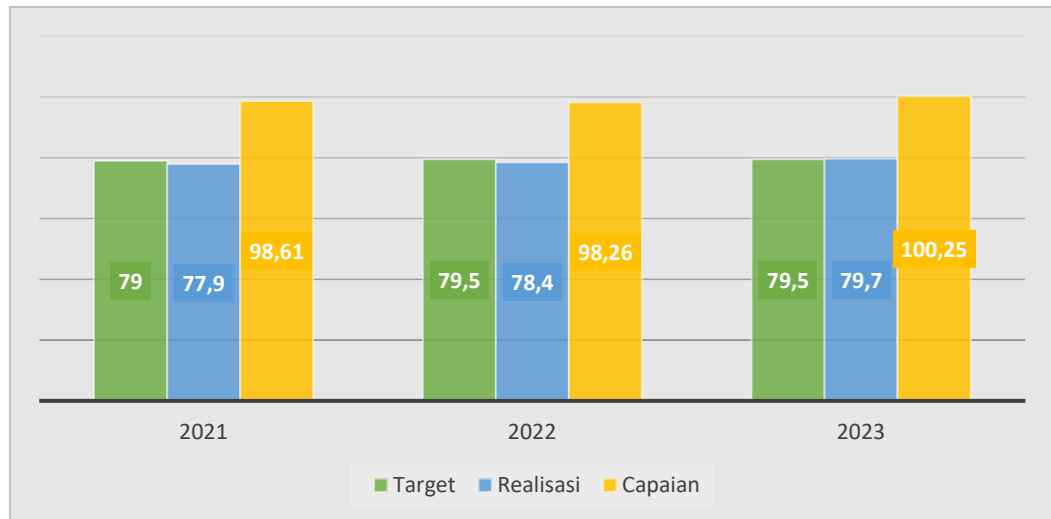
Tabel 11. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah IV TA 2023

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai AKIP TA 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi			79,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Perbandingan Kinerja

IKU L1.1	2021	2022	2023
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV			
Target	79 (BB)	79,50(BB)	79,50(BB)
Realisasi	77,90 (BB)	78,40 (BB)	79,70 (BB)
Capaian	98,61%	98,26%	100,25%

Gambar 17. Perbandingan IKU L1.1 Tahun 2021 s.d. 2023



Berdasarkan data perbandingan diatas, capaian kinerja IKU L1.1 mengalami peningkatan dari tahun 2021 (77,90/BB), 2022 (78,40/BB), dan 2023 (79,70/BB). Hal ini membuktikan bahwa siklus SAKIP pada Inspektorat Wilayah IV telah diimplementasikan dengan sangat baik, meskipun terdapat penurunan realisasi target di tahun 2022 karena ada perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Wilayah III kepada Inspektur Wilayah IV nomor 28799/PW/07/2023/70 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Inspektorat Wilayah IV, diketahui bahwa Inspektorat Wilayah IV telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi APIP tahun sebelumnya, antara lain mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan pada dialog kinerja,

dan memperhatikan perencanaan penetapan target IKU agar capaiannya tidak melebihi 120%.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Wilayah IV telah menyampaikan tabel tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 melalui Nota Dinas Nomor 51814/PW/12/2023/71 kepada Inspektur Wilayah III tanggal 1 Desember 2023. Pada Tahun 2023, Inspektorat Wilayah IV telah mengikuti kegiatan Dialog Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai salah satu bentuk evaluasi Internal yang dilakukan pada Semester I dan Semester II Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal juga melakukan Telaah Sejawat Internal sebagai bagian dari Program Penjaminan dan Peningkatan Mutu yang bertujuan untuk menilai kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar AAIP. Setiap Inspektorat Wilayah saling melakukan penilaian, Inspektorat Wilayah IV dinilai oleh Inspektorat Wilayah III. Berdasarkan hasil penilaian, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan nilai 79,01% dengan predikat cukup. Hal ini disampaikan pada Nota Dinas Nomor 55800/PW/12/2023/70 tanggal 29 Desember 2023.

Selain itu, Inspektorat Wilayah IV juga telah melakukan monitoring target IKU per triwulanan dan menjaga agar capaian IKU tidak melebihi 120%.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaian target IKU L1.1, yaitu:

1. banyaknya kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sementara terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia; dan
2. aplikasi *e-kinerja* telah selesai pengembangan pada akhir tahun 2023 namun penginputan secara sistem belum sepenuhnya dilaksanakan.

Upaya Perbaikan

Inspektorat Wilayah IV melakukan upaya – upaya perbaikan, yaitu:

1. melakukan penguatan koordinasi internal secara intensif untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja;
2. menyusun pemantauan capaian kinerja secara manual; dan
3. segera melakukan penginputan realisasi dan capaian kinerja melalui aplikasi *e-kinerja*.

Analisis Program Pendukung Capaian

Hal-hal yang mendukung program untuk mencapai kinerja L1.1, yaitu:

1. melakukan dialog kinerja Inspektorat Jenderal Semester I dan Semester II TA 2023; dan
2. melakukan monitoring target IKU per triwulanan agar capaian IKU tidak melebihi 120%.

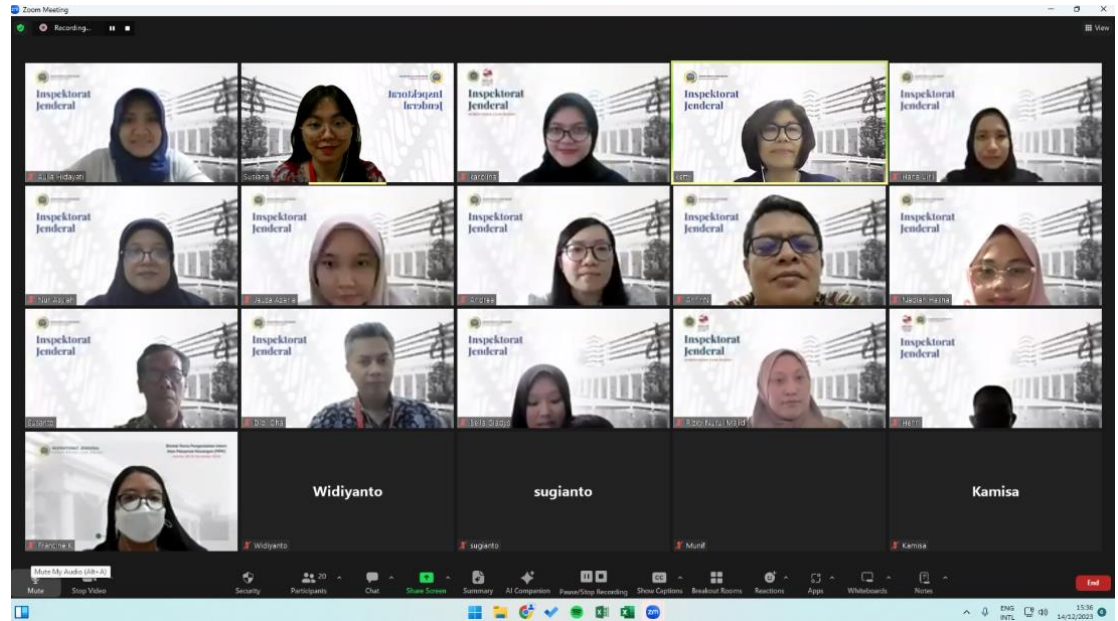
Proyeksi Ke depan

Inspektorat Wilayah IV berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan siklus SAKIP secara berkesinambungan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring yang semakin baik.

Gambar 18. Kegiatan Dialog Kinerja



Gambar 19. Kegiatan Telaah Sejawat



3.2 Realisasi Anggaran

Pada DIPA awal TA 2023, Inspektorat Wilayah IV mendapat alokasi pagu anggaran sebesar . Selama TA 2023, Inspektorat Wilayah IV mengalami 13 kali revisi yang terdiri dari 12 kali anggaran melalui revisi POK, dan 1 revisi usulan tambahan anggaran (ABT). Dengan demikian, pagu anggaran Inspektorat Wilayah IV menjadi sebesar . Realisasi anggaran TA 2023 sebesar atau mencapai 99,99% (100%).

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6 (enam) Indikator Kinerja Utama dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Pelaksanaan pengelolaan anggaran telah memperhatikan asas prioritas dan selektif untuk mendukung program kegiatan yang telah direncanakan, melalui mekanisme rapat koordinasi secara daring, maupun komunikasi informal dengan pihak yang berkepentingan. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV adalah 108,5 dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 94,84%, dan dengan rincian sebagai berikut:

No	IKU	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	C1.1 Indeks persepsi kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV	Audit pada Sekretariat Direktorat Diplomasi Publik			100%
2.		Audit pada KBRI Port Moresby dan KJRI Perth			100%
3.		Pendampingan DIPA Satker dalam Negeri dan Luar Negeri			99,99%
4.		Reviu atas Dokumen Manajemen Risiko			100%
5.	B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Evaluasi AKIP			100%
6.		Reviu Laporan Kinerja Kementerian			100%
7.	B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Reviu dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Bimtek, Unaudited, Audited), Semester I 2023, dan Triwulan III 2023			100%
8.		Reviu RKA-K/L TA 2024			100%
9.		Reviu RKBMN			99,99%
10.		Reviu Penyerapan Anggaran Belanja dan Realisasi Pendapatan serta Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (PBJ)			100%

No	IKU	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
11.	B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV dan B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan Semester II			100%
12.		Rekonsiliasi Pemantauan TP/TGR			100%
13.		Rekonsiliasi Pemantauan PFK Minus			100%
14.	L1,1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	Penyusunan Dokumen AKIP (PK, Renja K/L, RKA KL, Renaksi, e-Monev, e-Kinerja, LKj, RPD, Laporan SPIP, RR RPR dan Realisasi RPR (per triwulan dan tahunan))			99,95%
	Total				99,999%

3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

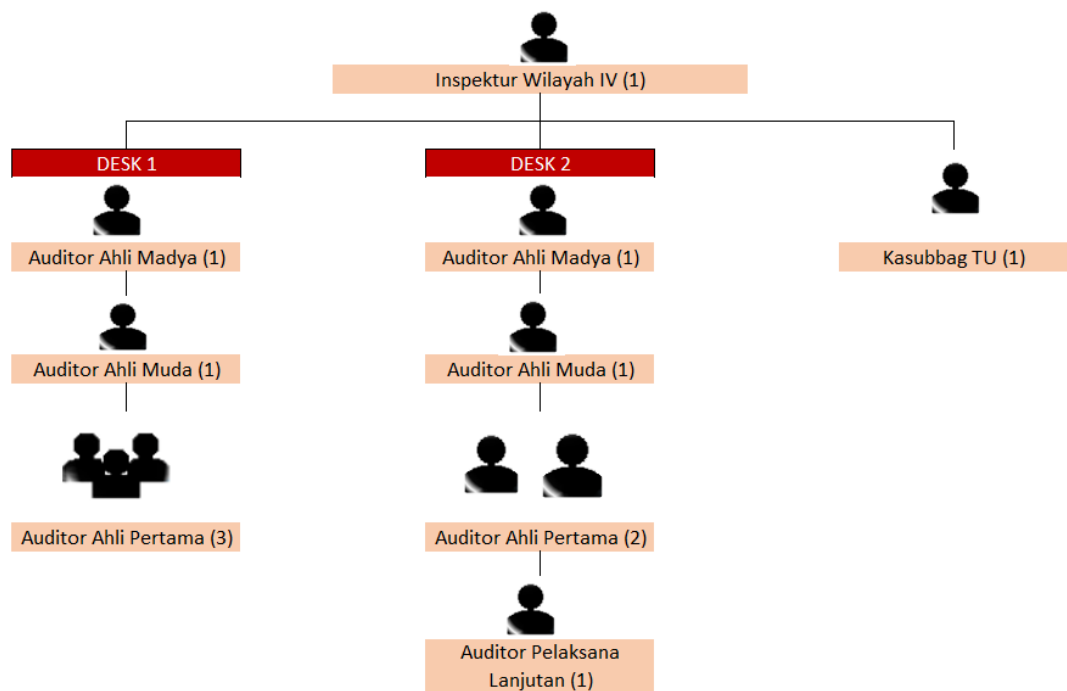
Terdapat kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat *pop up* bersamaan dengan tugas fungsi yang diemban, dan ditambah dengan sumber daya manusia yang terbatas, maka solusi yang dapat diupayakan adalah melalui penugasan auditor/staf pada kegiatan yang prioritas dan selektif tanpa mengurangi kualitas tugas pengawasan dan melaksanakan reuiu berjenjang untuk menjamin kualitas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai kode etik dan standar audit yang diamatkan dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Di samping itu, penguatan peran pengawasan juga didukung dengan keterlibatan auditor/staf dalam pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/sosialisasi sehingga menjadi nilai

tambah bagi organisasi dalam mendukung peningkatan level 3 kapabilitas APIP.

Pada akhir Oktober 2023, terdapat perubahan organisasi karena terdapat 1 (satu) orang auditor Madya yang menjalankan tugas SK 111. Hal ini menyebabkan perubahan pada pembagian kelompok kerja yang semula 3 *desk* menjadi 2 *desk*.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 16. Peta Jabatan Inspektorat Wilayah IV



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Nilai Capaian Kinerja Organisasi TA 2023 sebesar 108,50% yang terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) IKU. Capaian sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh anggaran yang terealisasi sebesar atau mencapai 99,99% (100%). Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, mulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi/pemantauan terhadap seluruh hasil kinerja yang dicapai.

Dari keenam IKU dimaksud, seluruh IKU telah mencapai target. Capaian kinerja atas seluruh IKU Inspektorat Wilayah IV telah melampaui 100%, yaitu sebesar 108,50%. Meskipun terdapat penurunan realisasi target di tahun 2022 pada IKU B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV, namun tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja yang memperoleh nilai AKIP 79,70/BB. Hal ini membuktikan bahwa siklus SAKIP pada Inspektorat Wilayah IV telah diimplementasikan dengan sangat baik.

Penyebab penurunan realisasi target di tahun 2022 disebabkan karena ada perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan capaian kinerja IKU B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP mengalami fluktuasi dari tahun 2021 (120%), 2022 (99,74%), dan 2023 (100,98%). Hal ini dikarenakan terdapat perubahan target IKU pada tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi atas realisasi IKU tahun 2021 yang melonjak tajam realisasinya yaitu 120%. Sedangkan realisasi tahun 2022 tidak dapat mencapai target karena terdapat rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti (jangka panjang), yang disebabkan belum dilakukan pembahasan kembali terkait kebijakan yang akan diambil sebagai bentuk penyelesaiannya.

Demikian pula pada capaian IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV mengalami fluktuasi dari tahun 2021 (120%), 2022 (100,26%), dan 2023 (111,66%). Hal ini dikarenakan terdapat perubahan target IKU pada tahun 2022 dan 2023 yang merupakan hasil evaluasi atas realisasi IKU tahun 2021 yang melonjak tajam realisasinya yaitu 120%. Sedangkan realisasi tahun 2022 dan 2023 sulit mencapai target karena terdapat rekomendasi yang belum memenuhi persyaratan rekomendasi, serta belum adanya rujukan/pedoman atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Satker.

Dalam kaitan capaian kinerja IKU B2.2 dan B2.3, Inspektorat Wilayah IV akan menguatkan koordinasi dengan Satker terkait sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi mengalami peningkatan.

4.2 Kendala dan Tantangan

Terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV, yaitu:

1. Faktor Internal

- a. Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI belum optimal melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, sehingga sebagian rekomendasi tahun sebelumnya masih muncul dan menjadi rekomendasi di tahun berikutnya;
- b. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi atas reviu dokumen keuangan yang belum optimal;
- c. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP yang membutuhkan koordinasi lebih intensif dengan satuan kerja terkait mengingat adanya beberapa temuan/rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti. Kesulitan tersebut antara lain yang terkait dengan pihak ketiga (rekanan/vendor) dan kesulitan menagihkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena keberadaan pegawai yang sudah pindah/pensiun;
- d. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang membutuhkan alokasi waktu yang memadai, serta memperkuat koordinasi dengan tim BPK;
- e. Koordinasi yang lebih intens dengan Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait mekanisme pelaksanaan-rekonsiliasi;
- f. Kapabilitas dan pengetahuan auditor masih harus terus ditingkatkan;
- g. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam waktu yang bersamaan;
- h. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (auditor);
- i. Perlunya dilakukan kajian dan penyusunan regulasi di Inspektorat Jenderal terkait dengan:

- 1) Standar Operasional Prosedur/SOP penginputan Laporan Hasil Audit/LHA ke SIPIK dan mekanisme monitoring Tindak Lanjut rekomendasi pada SIPIK;
- 2) peninjauan kembali atas Keputusan Inspektur Jenderal nomor SK/75143/B/PW/12/2019/67/11 tentang Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
- 3) Petunjuk Teknis atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah; dan
- 4) peninjauan kembali atas Kepirjen Nomor 00243/SK/PW/02/2019/11 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, mengingat PMK Nomor 150 Tahun 2014 yang digunakan sebagai rujukan hukumnya, telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 153 Tahun 2021.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya keterlibatan responden survei dalam mengisi survei persepsi kepuasan pada setiap kegiatan pengawasan;
- b. Satuan Kerja belum optimal melakukan tindak lanjut atas rekomendasi reviu dokumen keuangan, sehingga masih terdapat rekomendasi atas reviu tahun sebelumnya yang tetap muncul menjadi rekomendasi di tahun 2023;
- c. Terdapat keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan pengawasan intern khususnya pada kegiatan audit secara fisik ke Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini telah menjadi perhatian karena selama 3 tahun sejak masa pandemi audit dilaksanakan secara daring yang mana sangat mempengaruhi kualitas hasil audit. Audit secara daring sulit meyakini keabsahan dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan karena telaah dokumen hanya terbatas melalui dokumen scan yang berpotensi dapat diubah. Keterbatasan anggaran juga tidak hanya dialami untuk kegiatan audit namun juga pada kegiatan reviu khususnya permasalahan PFK Minus dan permasalahan pembukuan Perwakilan yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Kemenlu; dan
- d. Terdapat kegiatan pengawasan yang waktunya bersamaan seperti jadwal pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang bersamaan dengan kegiatan pengawasan lainnya karena undangan dari Satuan Kerja.

4.3 Proyeksi ke Depan

Dalam mengatasi kendala dan tantangan di atas, terdapat langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Wilayah IV, sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengingatkan Satuan Kerja untuk mengisi survei persepsi kepuasan pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah IV;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI dalam rangka mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi secara tepat waktu;
3. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang andal dalam penatausahaan administrasi dan pemantauan tindak lanjut;
4. Mendorong agar dilakukan perbaikan Manual IKU;
5. Kegiatan pengawasan intern perlu didukung dengan kebutuhan anggaran yang memadai khususnya untuk kegiatan audit secara fisik dan reviu dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian intern organisasi Kemenlu;
6. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga tindak lanjut rekomendasi audit APIP dan pemeriksaan BPK dapat lebih efektif;
7. Mengusulkan penambahan auditor baru;
8. Memperbanyak kegiatan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan webinar kepada pegawai/auditor;
9. Melakukan koordinasi waktu pelaksanaan kegiatan dengan Unit Organisasi/Satuan Kerja/Perwakilan RI; dan
10. Mengusulkan dilakukan kajian, peninjauan kembali maupun penyusunan regulasi di Inspektorat Jenderal.

Ke depan, Inspektorat Wilayah IV akan melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.